

RENJA

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2021



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, b. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, c. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, d. Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis saat ini dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam Renja 2021 terdapat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menuntut kesiapan seluruh unsur pimpinan untuk melakukan inovasi, kreativitas dan terobosan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas dapat dicapai sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparaturnya di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan

dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Pangkalpinang, 2020

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
B A B I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian.....	6
B A B II.....	9
PERENCANAAN KINERJA HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	9
2.1.1. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan.....	9
Tabel 2.1.1 Rekapitulasi APBD dan APBD-Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	10
Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Dana APBN (Dekonsentrasi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	10
2.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	10
2.1.3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	11
Tabel. 2.1.3.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan s.d Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	34
2.3.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.....	34
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2021.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	92
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	93
B A B III.....	97
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	97

3.1. CAPAIAN KINERJA	97
3.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI	97
3.2.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	98
3.2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	99
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	100
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disperindag Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	102
BAB IV	117
PENUTUP	117

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tahun 2021, perencanaan ini menyesuaikan permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan disusun

sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Demikian pula halnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana Kerja ini pun merupakan kolaborasi dari sistem perencanaan pembangunan Tahunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan hasil proses panjang pada kesepakatan program dan kegiatan mulai dari penyelenggaraan Forum OPD, pra Musrenbang sampai dengan Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang mencakup rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan urusan Industri dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan pilihan Industri dan Perdagangan baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjabarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 dan realisasi Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjabarkan indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menguraikan Permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan serta kaitannya dengan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Menguraikan evaluasi kinerja hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menggambarkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, berisikan penjelasan ;

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

B A B II

PERENCANAAN KINERJA HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.1 Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp.23.636.309.547,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.12.493.158.847,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp.11.143.150.700,00. Pada APBD perubahan tahun 2019, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Rp.24.456.586.995,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.820.277.448,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.13.206.236.295,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.713.077.448,00) dan belanja langsung sebesar Rp. 11.250.350.700,00 (mengalami penambahan sebesar Rp.107.200.000,00).

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi APBD dan APBD-Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Belanja	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	12.493.158.847,00	13.206.236.295,00	12.089.520.417,00	91,54
Belanja Langsung	11.143.150.700,00	11.250.350.700,00	9.853.364.569,82	87,58
Total Belanja	23.636.309.547,00	24.456.586.995,00	21.942.884.986,82	89,72

Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Dana APBN (Dekonsentrasi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No.	Kementerian	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.564.900.000	1.520.188.356	97,14
2.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.179.661.000	1.080.539.290	91,60
3.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	532.609.000	485.753.325	91,20
			3.277.170.000	3.086.480.971	94,18

2.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2019 urusan perindustrian dan perdagangan pada Belanja Langsung APBD Induk dilaksanakan melalui 6 (enam) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan dan pada APBD Perubahan menjadi 6 (enam) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.250.350.700,00 dengan Realisasi serapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.853.364.569,82 atau 87,58%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.413.840.630,18 atau 12,51 %.

2.1.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang disajikan pada table Tabel 2.1.3.1.

Tabel. 2.1.3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan s.d Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Disperind g) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Disperind ag tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Disperindag s.d. 2020	
					Target Renja Disperind ag Tahun 2019	Realisasi Renja Disperindag Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan : Pilihan									
6	1	1								
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	100	100,00

					Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	4	3	3	3	100	3	3	75,00
6	1	1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	132	132	132	100	132	396	60,00
6	1	1	2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (orang)	660	132	132	132	100	132	396	60,00
6	1	1	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur PD yang meningkat kapasitasnya (orang)	195	8	10	10	100	20	38	19,49
6	1	1	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan PD dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah	11	2	2	2	100	4	8	72,73

						PD diatas 85% (dokumen)								
6	1	1	5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD dengan realisasi target diatas 90% (jenis dokumen)	25	5	5	5	100	5	15	60,00	
6	1	1	6	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pegawai (orang)	402	134	0	0	#DIV/0!	0	134	33,33	
6	1	2		Program Pengembang an Perdagangan	Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	4.310.000	862.000	862.000	619.141,19	71,83	862.000	2.343.141,19	54,37	
					Persentase Rumah Tangga Miskin yang bekerja di sektor Perdagangan	50	0	10	0	0	10	10	20	
					Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang	100	79	83	83	100	89	89	89,00	

					kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)								
					Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun	100	2,30	63	0	0	12	14,3	14,30
					Persentase Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	100	0	20	20	100	40	60	60,00
					Pertumbuhan Komoditi yang terjual melalui pasar lelang	4	0	1	0	0	1	1	25,00
					Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	50	0	10	10	100	10	20	40,00
6	1	2	1	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	270	30	30	41	136,67	50	121	44,81
6	1	2	2	Operasi Pasar Murah	Jumlah Masyarakat (KK)	150000	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

6	1	2	3	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku usaha	250	22	45	37	82,22	50	109	43,60
6	1	2	4	Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	jumlah lahan yang dibebaskan (lahan)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	2	5	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah gudang yang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola (bangunan dan sistem resi gudang)	13	2	1	1	100	0	3	23,08
6	1	2	6	Pembinaan monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	300	40	40	40	100	0	80	26,67
					Jumlah Distributor dan Pelaku Usaha yang di monitoring	45	0	0	0	#DIV/0!	45	45	100,00
6	1	2	7		Jumlah Keikutsertaan	72	0	3	3	100	0	3	4,17

				Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi akses pasar	15	0	0	0	#DIV/0!	15	15	100,00
6	1	2	8	Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	Jumlah orang (Orang)	960	170	0	0	#DIV/0!	0	170	17,71
6	1	2	9	Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya	80	0	20	20	100	20	40	50,00
6	1	2	10	Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi (orang)	1000	200	11	17	154,55	0	217	21,70
6	1	2	11	Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Jumlah Pelaku usaha (Pelaku usaha)	250	30	0	0	#DIV/0!	0	30	12,00
6	1	2	12	Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	jumlah peserta (Pelaku usaha)	250	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00

6	1	2	13	Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah penyelenggaraan (kali)	12	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	2	14	Pengadaan Gerobak	Jumlah gerobak (unit)	80	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	2	15	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Jumlah Orang	960	0	10	10	100	10	20	2,08
6	1	3		Program Pengembangan Wilayah dan Pegawasan Industri	Jumlah industri yang memenuhi standar	75	15	15	18	120	15	48	64,00
					Jumlah Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Sentra	4	0	1	1	100	1	2	50,00
6	1	3	1	Finalisasi RPIP	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00

6	1	3	2	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	5	1	1	1	100	0	2	40,00
6	1	3	3	Pengembangan Kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang Tersusun (Dokumen)	5	0	0	0	#DIV/0!	1	1	20,00
6	1	3	4	Monev Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	3	5	Pembinaan Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah Lokasi Pembinaan (Lokasi)	8	0	0	0	#DIV/0!	4	4	50,00

6	1	3	6	Penyusunan Profil Kawasan Strategis/kawasan Industri/sentra	Jumlah Profil yang tersusun (buku)	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	3	7	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan pembentukan sentra industri (lokasi)	9	1	2	2	100	0	3	33,33
6	1	3	8	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun	4	0	1	1	100	1	2	50,00
6	1	3	9	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	5	3	1	9	900	0	12	240,00

6	1	3	10	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Industri yang diawasi (Industri)	258	58	50	50	100	50	158	61,24
6	1	3	11	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri	340	0	60	60	100	0	60	17,65
6	1	4		Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase Tenaga kerja industri terhadap total tenaga kerja	26,20	5,9	5,17	5,17	100	5,24	16,31	62,25
					Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	3,55	2,2	0,70	0,70	100	0,71	3,61	101,69

						Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	1,694	0,3	0,319	0,319	100	0,333	0,952	56,20
						Persentase Industri yang memiliki informasi Kandungan nutrisi Olahan Pangan	34,98	0,82	4,68	4,68	100	6,71	12,21	34,91
						Pertumbuhan Industri pada Sektor Pertanian (unit)	7.620	1.497	1.499	1.499	100	1.524	4.520	59,32
						Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian (%)	52,16	15,60	10,28	10,28	100	10,44	36,32	69,63

						Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	23	4	4	4	100	5	13	56,52
						Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan	5,180	0,050	1,035	1,035	100	1,036	2,121	40,95
6	1	4	1	Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	jumlah pelaku industri (pelaku industri)	1686	210	0	0	#DIV/0!	0	210	12,46	

6	1	4	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih (pelaku industri/masyarakat)	580	125	80	80	100	170	375	64,66
6	1	4	3	Inkubator Wirausaha baru	Jumlah Kelompok baru	19	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	4	4	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku industri yang terfasilitasi	4.050	610	700	700	100	550	1860	45,93
6	1	4	5	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	2280	400	400	400	100	450	1250	54,82
6	1	4	6	Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif	156	21	30	30	100	0	51	32,69
6	1	4	7	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP	43	3	9	9	100	9	21	48,84
6	1	4	8	Promosi/Gelar Produk Industri	Jumlah event	45	20	9	15	166,67	0	35	77,78

6	1	4	9	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	2.550	500	500	500	100	500	1500	58,82
6	1	4	10	Seminar Halal Internasional	Jumlah Peserta	500	100	0	0	#DIV/0!	0	100	20,00
6	1	4	11	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Teknologi Tepat Guna	11	0	0	0	#DIV/0!	2	2	18,18
6	1	4	12	Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah produk yang memiliki informasi nutrisi	600	0	120	120	100	0	120	20,00

6	1	5		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolologia n	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	100	10	14	14	100	18	42	42,00
					Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Pahami)	34	43,9	22	43,34	197	25	43,34	127,47

					Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrollogian yang memenuhi standar	100	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00
6	1	5	1	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah (barang/Jasa)	50	10	10	10	100	16	36	72,00
6	1	5	2	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah kab/Kota (koordinasi)	35	7	0	0	#DIV/0!	7	14	40,00
6	1	5	3	Peringatan Hari Konsumen Nasional	Jumlah Peserta (orang)	1500	500	0	0	#DIV/0!	0	500	33,33
6	1	5	4	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Konsumen (responden)	2000	400	400	400	100	400	1200	60,00

6	1	5	5	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	134	0	36	36	100	34	70	52,24
6	1	5	6	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta	1830	0	100	100	100	100	200	10,93
6	1	5	7	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Kasus	14	0	1	0	0	1	1	7,14
6	1	5	8	Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pengawasan	98	0	14	14	100	25	39	39,80

6	1	6		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	82	18	18	18	100	18	54	65,85
6	1	6	1	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah orang (aparatur)	115	23	26	26	100	23	72	62,61
6	1	6	2	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah ruang lingkup	19	2	3	2	66,67	2	6	31,58
6	1	6	3	Monitoring Mutu Pengujian	Jumlah laporan	6	2	1	1	100	1	4	66,67
6	1	6	4	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah personil (aparatur)	60	8	10	10	100	0	18	30,00

6	1	6	5	Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta (Peserta)	200	0	200	200	100	0	200	100,00
---	---	---	---	---	--------------------------	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	--------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Evaluasi dan hasil analisis pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Disperindag				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kawasan Industri Dan Sikim		Jumlah Kawasan dan SIKIM/Jumlah Target 5 Tahun x 100%	20%	20	0 : 14	20	100%	14	20%	20%	
2	Persentase Produk Industri yang berdaya saing		Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N-1)*100	20	20	20	20	20	20	20	20	
3	Persentase Tenaga kerja Sektor Industri		Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100	20	20	20	20	20	20	20	20	

4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)		Jumlah Sarana Perdagangan tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) *100	2.3	1.15	1.15	1.15	2.3	0	1.15	1.15	
5	Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)		Volume Ekspor tahun N	355.746,97	355.746,97	391.321,67	430.453,83		619.141,19	430.453,83	473.499,22	
6	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Tersedia Setiap Waktu		Koefisien Variasi tahun N) < 11	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	100%	100%	11 : 100	11 : 100	
7	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib) ;Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha perdagangan)		Barang dan Jasa diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa)*100 dan Pelaku Usaha yang diawasi tahun N	10 ; 18	10 ; 18	14;20	18 ;25		14 ; 26	18 ;25	27; 35	
8	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)		Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan	35	35	37	40	43	43,34	40	45	
9	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji		Jumlah Komoditi yang diuji tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Komoditi tahun N-1)*100			33,33	33,33		18	33,33	33,33	
10	Predikat (Nilai) SAKIP		Nilai SAKIP	3	3	3	5	4	4	3	5	

	Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)											
11	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2017 – 2022, beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas industri dan perdagangan Provinsi Bangka Belitung adalah :

2.3.1 Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

1. Masih rendahnya nilai tambah sektor Industri

Pengolahan

- Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri
- Pengembangan Kawasan Industri Sadai masih dalam proses pembangunan
- Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan
- Masih rendahnya pengembangan produk potensial ekspor
- Belum maksimalnya pemetaan potensi ekspor

Industri paling banyak ditemukan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkalpinang.

Jumlah Industri Kecil 15.108 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 106 Unit dan Industri Besar sebesar 98 Unit secara total terdapat 15.312 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 52.043 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 18.36 % dari tahun sebelumnya

Pada tahun 2019, Jumlah Industri Kecil 17.024 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 99 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit secara total terdapat 17.211 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 48.327 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 12.40 % dari tahun sebelumnya. Untuk 88 Industri Besar di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.323 tenaga kerja.

Sekitar 40% Industri Besar dan Sedang ini merupakan Industri yang bergerak di sektor makanan, 23% persen Industri Logam Dasar, dan 15 % Industri Barang Galian Bukan Logam.

Pada tahun 2020, Jumlah Industri Kecil 18.607 Unit, sedangkan Industri Sedang berjumlah 100 Unit dan Industri Besar sebesar 88 Unit dan secara total terdapat 18.795 Unit dengan total tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 50.553 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 9.20 % dari tahun sebelumnya. Ada tercatat 88 industri besar dan sedang di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang menyerap 8.318 tenaga kerja.

2. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah

Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan

informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas, sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data dan informasi.

3. Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah

sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2 "Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Bemsaha di sektor perindustrian wajib memiliki Akun SIINas".

4. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) ada yang masih bersifat individu/perorangan/petani langsung.

Hal ini disebabkan:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya, bahwa "Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan;
- b. Tidak adanya laporan tertulis dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) tentang realisasi perdagangan

bahan berbahaya kepada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2).

- c. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawas di daerah terhadap perdagangan Bahan Berbahaya (B2).

5. Kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat.

- a. Kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang atau produk hasil produksi.
- b. Kesulitan dengan jarak yang relatif jauh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam menjalankan proses distribusi suatu produk atau barang. Jarak bisa saja menjadi salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam proses distribusi barang dagangan dikarenakan faktor jarak atau lamanya waktu tempuh bisa mengakibatkan kerusakan pada barang -yang mengakibatkan kualitas barang menjadi turun- pada saat barang dalam proses perjalanan ke tempat tujuan.
- c. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan distribusi barang.

6. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

- a. Kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.
- b. Masih kurang intensifnya koordinasi dan mekanisme antara instansi terkait di pemerintahan Provinsi dengan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pemantauan dan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

7. Adanya kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi dan terlambatnya distribusi pupuk.

Kurangnya informasi data jumlah pasokan pupuk subsidi dan data penerima/petani pengguna pupuk subsidi.

8. Adanya produk ekspor yg tidak tercatat di pabean Pangkalpinang.

- a. Belum adanya pelabuhan ekspor yg layak;
- b. Turunnya harga komoditas;
- c. Belum maksimalnya diversifikasi produk ekspor;
- d. Belum maksimalnya akses pasar ekspor;
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM dan produk ekspor;
- f. Tingginya biaya pengiriman produk ekspor.

Penyebab penurunan ekspor non migas tahun 2018 dan 2019 adalah Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2018 sebesar 1 700, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2018 sebesar (USD juta) 1 563. Hal tersebut disebabkan turunnya jumlah ekspor komoditi timah karena adanya surat edaran bersama ICDX dan ICH tentang pencabutan kewenangan surveyor Indonesia dalam memverifikasi asal usul biji timah. Produksi yang telah di verifikasi oleh lembaga survei tersebut tidak dapat di ekspor.

Target nilai ekspor produk non migas pada tahun 2019 sebesar 1 800, sementara realisasi ekspor non migas tahun 2019 sebesar (USD juta) 1 294. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (competent person

of Indonesia) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut

9. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen.

dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

10. Lingkup Layanan pengujian dan sertifikasi yang masih sangat terbatas

- a. dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandardisasi sangat terbatas
- b. sinkronisasi regulasi pusat dan daerah yang belum maksimal untuk pemanfaatan layanan laboratorium pengujian di daerah
- c. Layanan pengujian sangat tergantung dengan jumlah produksi komoditi daerah

11. Belum Optimalnya pemasaran produk-produk lokal pada pasar lokal maupun luar daerah.

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan dalam pemasaran dan promosi,
- b. Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah yang berorientasi nasional
- c. Kurangnya kreativitas, kapasitas dan kompetensi UMKM terhadap produk dalam negeri

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 2021

Berdasarkan telaah rancangan awal RKPD 2021 dengan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.4.1.

Tabel 2.4.1

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-9	-8	-10	
01.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.792.754.788	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				23.882.275.205
1	Urusan Pemerintahan				2.642.754.788	Urusan Pemerintahan				15.812.275.205
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				2.642.754.788	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Nilai SAKIP PD (pakai angka)	0	15.812.275.205
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan tersusun	11	510.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	11	360.000.000
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2	160.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	2	100.000.000

	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Air Itam	Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2	30.000.000	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Air Itam	Jumlah RKA/DPA yang tersusun	2	30.000.000
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen evaluasi PD (DALEV)	4	120.000.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen evaluasi PD (DALEV)	4	30.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Air Itam	Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1	150.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Air Itam	Jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1	150.000.000
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3	50.000.000	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Air Itam	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3	50.000.000
	Administrasi Keuangan		Survey kepuasan pelayanan keuangan		175.000.000	Administrasi Keuangan		Survey kepuasan pelayanan keuangan (angka)		12.164.520.417
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Air Itam	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	95	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Air Itam	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	95	12.089.520.417
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Air Itam	Jumlah pelaksana tugas ASN	37	-					

	Sub Kegiatan 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Air Itam	Jumlah bahan verifikasi	2	25.000.000					
	Sub Kegiatan 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Air Itam	Jumlah laporan akuntansi keuangan	1	25.000.000					
	Sub Kegiatan 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Air Itam	Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2	25.000.000	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Air Itam	Jumlah laporan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2	25.000.000
	Sub Kegiatan 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Air Itam	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	25.000.000					
	Sub Kegiatan 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Air Itam	Jumlah laporan keuangan bulanan	2	25.000.000	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semester an	Air Itam	Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	2	25.000.000
	Sub Kegiatan 8. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Air Itam	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	0	25.000.000					
	Sub Kegiatan 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Air Itam	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	25.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Air Itam	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	25.000.000
	Administrasi umum		survey kepuasan		1.637.754.788	Administrasi umum		Survey kepuasan pelayanan umum (angka)		2.829.754.788

			pelayanan umum							
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Air Itam	Jumlah Barang yang dikirim (Paket/Tahun)	1	15.000.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Air Itam	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1	15.000.000
		Air Itam	Jumlah Materai yang tersedia (Buah)	800	4.800.000		Air Itam	Jumlah Materai	800	4.800.000
	Sub Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air Itam	Jumlah tagihan komunikasi (bulan)	12	12.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Itam	Jumlah tagihan komunikasi (bulan)	12	24.000.000
		Air Itam	Jumlah tagihan Air				Air Itam	Jumlah tagihan Air	0	-
			Jumlah tagihan listrik	12	236.454.788		Air Itam	Jumlah tagihan listrik	12	120.454.788
	Sub Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Air Itam	Jumlah jasa peralatan kantor yang tersedia (Tahun)	1	100.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1	26.800.000
							Air Itam	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	9	339.300.000
	Sub Kegiatan 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Air Itam	Jumlah ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan	0	55.000.000					

	Sub Kegiatan 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Air Itam	Jumlah penyediaan Jasa barang milik daerah	5 barang	-	Penyediaan jasa jaminan barang milik negara	Air Itam	Jumlah barang milik negara yang dijamin	0	-
	Sub Kegiatan 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanal	Air Itam	Jumlah penyediaan pemeliharaan dan perizinan	10 perizina n	-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Air Itam	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	6	8.800.000
							Air Itam	Jumlah tenaga sopir	3	113.100.000
	Sub Kegiatan 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Air Itam	Jumlah ASN	7 pegawai	25.000.000	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Air Itam	Jumlah pengelola administrasi keuangan	15	125.000.000
	Sub Kegiatan 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Air Itam	Jumlah barang kebersihan	15 barang	27.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	0	-
							Air Itam	Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	25	942.500.000
	Sub Kegiatan 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Air Itam	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	15 barang	25.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Air Itam	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15	24.000.000
	Sub Kegiatan 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Air Itam	Jumlah penyedian ATK	10 barang	75.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Air Itam	Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	84.000.000
	Sub Kegiatan 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Air Itam	Jumlah cetak dan penggandaan	5 barang	15.000.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Air Itam	jumlah barang cetak	30	4.500.000

							Air Itam	Jumlah penggandaan	30000	15.000.000
	Sub Kegiatan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Air Itam	Jumlah instalasi gedung kantor	1 instalasi	-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Air Itam	Jumlah komponen instalasi listrik	10	25.000.000
	Sub Kegiatan 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Air Itam	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	5 peralatan	100.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah peralatan kantor	10	100.000.000
							Air Itam	Jumlah perlengkapan kantor	5	65.000.000
	Sub Kegiatan 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Air Itam	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	7 barang	35.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga	0	-
	Sub Kegiatan 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Air Itam	Jumlah bahan perundang-undangan	24 buah	7.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Air Itam	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	24	7.500.000
	Sub Kegiatan 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Air Itam	Jumlah penyediaan logistik kantor	2 barang	25.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Air Itam	Jumlah bahan logistik kantor	3	25.000.000
	Sub Kegiatan 17. Penyediaan Makanan dan Minuman	Air Itam	Jumlah penyediaan makan dan minum	3500 pax	85.000.000	Penyediaan makan dan minum	Air Itam	Jumlah makan dan minum Tamu (tahun)	1200	42.000.000
							Air Itam	Jumlah makan dan minum rapat (kotak)	1200	18.000.000

	Sub Kegiatan 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Air Itam	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	115 kunjungan LD	450.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (paket)	1	350.000.000
							Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (paket)	1	150.000.000
						Pengadaan mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0	-
						Pengadaan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diadakan	0	-
						Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	-
	Sub Kegiatan 23. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Air Itam	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 barang	45.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Air Itam	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1	25.000.000
						Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	0	-
	Sub Kegiatan 25. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Air Itam	Jumlah pengadaan peralatan	5 Alat	100.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Air Itam	Jumlah peralatan gedung kantor	1	25.000.000
	Sub Kegiatan 26. Pengadaan Mebeleur	Air Itam	Jumlah mebeleur	5 barang	35.000.000	Pengadaan mebeleur	Air Itam	Jumlah mebeleur	1	20.000.000

						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0	-
	Sub Kegiatan 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Air Itam	Jumlah gedung/kantor yang dilakukan perawatan	1 gedung	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Air Itam	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (paket)	1	30.000.000
	Sub Kegiatan 30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Air Itam	Jumlah mobil dinas yang dilakukan perawatan	1 mobil	100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Air Itam	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	50.000.000
	Sub Kegiatan 31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kendaraan Dinas/Operasional	Air Itam	Jumlah mobil operasional dinas yang dilakukan perawatan	1 mobil	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Air Itam	Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	5	50.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	0	-
	Sub Kegiatan 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Air Itam	Jumlah perlengkapan gedung yang di rawat	2 gedung	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala		Jumlah peralatan rumah dinas/jabatan yang dipelihara	0	-

						peralatan rumah jabatan/dinas				
	Sub Kegiatan 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Air Itam	Jumlah peralatan gedung yang di rawat	5 buah	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	-
	Sub Kegiatan 36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Mebeluer	Air Itam	Jumlah meubeler yang dilakukan pemeliharaan	2 buah	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		Jumlah meubelair yang dipelihara	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang di rehabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat Rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	0	-
					-	Administrasi umum (BPSMB)		Survey kepuasan pelayanan umum (angka)		250.000.000

						Penyediaan Jasa surat menyurat	Air Itam	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1	1.500.000
							Air Itam	Jumlah Materai	300	1.800.000
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Itam	Jumlah tagihan komunikasi (bulan)	12	6.000.000
							Air Itam	Jumlah tagihan Air	0	-
							Air Itam	Jumlah tagihan listrik	12	58.000.000
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	0	-
							Air Itam	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	0	-
						Penyediaan jasa jaminan barang milik negara	Air Itam	Jumlah barang milik negara yang dijamin	0	-
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Air Itam	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3	3.000.000
							Air Itam	Jumlah tenaga sopir	0	-
						Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Air Itam	Jumlah pengelola administrasi keuangan	0	-
						Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	0	-

							Air Itam	Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	0	-
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Air Itam	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	12.000.000
						Penyediaan alat tulis kantor	Air Itam	Jumlah jenis ATK yang dibeli	1	12.000.000
						Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Air Itam	jumlah barang cetak	1	10.000.000
							Air Itam	Jumlah penggandaan	30000	3.000.000
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Air Itam	Jumlah komponen instalasi listrik	10	2.250.000
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah peralatan kantor	0	-
							Air Itam	Jumlah perlengkapan kantor	0	-
						Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga	5	1.250.000
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Air Itam	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5	1.200.000

						Penyediaan bahan logistik kantor	Air Itam	Jumlah bahan logistik kantor	3	3.000.000
						Penyediaan makan dan minum	Air Itam	Jumlah makan dan minum Tamu (tahun)	1	7.500.000
							Air Itam	Jumlah makan dan minum rapat (kotak)	12	10.000.000
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (paket)	1	75.000.000
							Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (paket)	1	25.000.000
						Pengadaan mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0	-
						Pengadaan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diadakan	0	-
						Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	-
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Air Itam	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0	-
						Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	0	-

						Pengadaan peralatan gedung kantor	Air Itam	Jumlah peralatan gedung kantor	0	-
						Pengadaan mebeleur	Air Itam	Jumlah mebeleur	1	5.000.000
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Air Itam	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (paket)	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Air Itam	Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	3	12.500.000
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	-

						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah dinas/jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		Jumlah meubelair yang dipelihara	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang di rehabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat Rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	0	-
					-	Administrasi umum (RPK)		Survey kepuasan pelayanan umum (angka)		158.000.000

						Penyediaan Jasa surat menyurat	Air Itam	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	1	1.800.000
							Air Itam	Jumlah Materai	200	1.200.000
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Air Itam	Jumlah tagihan komunikasi (bulan)	12	6.000.000
								Jumlah tagihan Air	0	-
							Air Itam	Jumlah tagihan listrik	12	48.000.000
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	1	2.500.000
								Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor	0	-
						Penyediaan jasa jaminan barang milik negara		Jumlah barang milik negara yang dijamin	0	-
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	0	-
								Jumlah tenaga sopir	0	-
						Penyediaan jasa Administrasi keuangan		Jumlah pengelola administrasi keuangan	0	-
						Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor	0	-

								Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	0	-
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Air Itam	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5	2.500.000
						Penyediaan alat tulis kantor	Air Itam	Jumlah jenis ATK yang dibeli	10	5.000.000
						Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Air Itam	jumlah barang cetak	30	1.500.000
							Air Itam	Jumlah penggandaan	5000	1.500.000
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Air Itam	Jumlah komponen instalasi listrik	10	2.500.000
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Air Itam	Jumlah peralatan kantor	10	10.000.000
							Air Itam	Jumlah perlengkapan kantor	5	15.000.000
						Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga	0	-
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Air Itam	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	24	1.500.000

						Penyediaan bahan logistik kantor	Air Itam	Jumlah bahan logistik kantor	3	2.500.000
						Penyediaan makan dan minum	Air Itam	Jumlah makan dan minum Tamu (tahun)	100	3.500.000
							Air Itam	Jumlah makan dan minum rapat (kotak)	200	3.000.000
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah (paket)	1	25.000.000
							Air Itam	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah (paket)	1	25.000.000
						Pengadaan mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang diadakan	0	-
						Pengadaan kendaraan dinas/oprasional		Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diadakan	0	-
						Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	-
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor	0	-
						Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	0	-

						Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor	0	-
						Pengadaan mebeleur		Jumlah mebeleur	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara (paket)	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional		Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah jabatan/dinas		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	-

						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas		Jumlah peralatan rumah dinas/jabatan yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	-
						Pemeliharaan rutin/berkala meubelair		Jumlah meubelair yang dipelihara	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan		Jumlah rumah jabatan yang di rehabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas		Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat Rumah gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	0	-
						Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi	0	-
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Survey kepuasan pelayanan		320.000.000	Peningkatan Disiplin dan		Survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)		-

			kepegawaian (angka)			Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Air Itam	Jumlah mesin absensi	1 unit	15.000.000	Pengadaan mesin/kartu absensi		Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0	-
	Sub Kegiatan 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Air Itam	Jumlah pakaian dinas	98 pegawai	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	-
	Sub Kegiatan 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Air Itam	Jumlah pakaian kerja Lapangan	10 pegawai	10.000.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	-
	Sub Kegiatan 4. Pengadaan Pakaian Korpri	Air Itam	Jumlah Pakaian KORPRI	-	-	Pengadaan pakaian kopri		Jumlah pakaian kopri yang diadakan	0	-
	Sub Kegiatan 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Air Itam	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari tertentu	98 pegawai	50.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	0	-
	Sub Kegiatan 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Air Itam	Jumlah ASN yang dibantu	2 pegawai	25.000.000	Pemulangan pegawai yang pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	0	-
	Sub Kegiatan 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Air Itam	Jumlah ASN yang dibantu	2 pegawai	25.000.000	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas		Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan	0	-
	Sub Kegiatan 8. Pemindahan Tugas PNS	Air Itam	Jumlah ASN yang pindah tugas	2 pegawai	15.000.000	Pemindahan tugas belajar		Jumlah pegawai tugas belajar yang dipindahkan	0	-

	Sub Kegiatan 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Air Itam	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 pegawai	100.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	0	-
	Sub Kegiatan 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Air Itam	Jumlah peserta sosialisasi	20 pegawai	45.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	-
	Sub Kegiatan 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Air Itam	Jumlah peserta Bimtek	15 pegawai	35.000.000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	-
					-	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)		Survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)		50.000.000
						Pengadaan mesin/kartu absensi		Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian kopri		Jumlah pakaian kopri yang diadakan	0	-

						Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	0	-
						Pemulangan pegawai yang pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	0	-
						Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas		Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan	0	-
						Pemindahan tugas belajar		Jumlah pegawai tugas belajar yang dipindahkan	0	-
						Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	18	50.000.000
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	-
						Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	-
					-	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)		Survey kepuasan pelayanan kepegawaian (angka)	0	-

						Pengadaan mesin/kartu absensi		Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian kopri		Jumlah pakaian kopri yang diadakan	0	-
						Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	0	-
						Pemulangan pegawai yang pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	0	-
						Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas		Jumlah pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas yang dipulangkan	0	-
						Pemindahan tugas belajar		Jumlah pegawai tugas belajar yang dipindahkan	0	-
						Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	0	-

						Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	-
						Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0	-
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				5.275.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				4.575.000.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga	2,14	175.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga	2,14	175.000.000
	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	175.000.000	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan	3	175.000.000
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Air Salemba, Srimenanti, Tanjung Pandan	Jumlah Pemeriksaan	3	75.000.000	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Air Salemba, Srimenanti, Tanjung Pandan	Jumlah Pemeriksaan	3	75.000.000

	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pasir Padi, Nelayan, Sungai Daeng, Koba, Sukadama, Tanjung Pandan, Padang	Jumlah Pengawasan	7	100.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pasir Padi, Nelayan, Sungai Daeng, Koba, Sukadama, Tanjung Pandan, Padang	Jumlah Pengawasan	7	100.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				400.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				400.000.000
			Jumlah DED	1	150.000.000			Jumlah DED	1	150.000.000
			Jumlah Sarana Perdagangan	0	250.000.000			Jumlah Sarana Perdagangan	0	250.000.000
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas				400.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas				400.000.000
			Jumlah Dokumen	1	150.000.000			Jumlah Dokumen	1	150.000.000

			Jumlah Pusat Distribusi Provinsi	0	250.000.000			Jumlah Pusat Distribusi Provinsi	0	250.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	kp.mel ayu tuatun u	Tersedianya Rancangan DED	1	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	kp.mela yu tuatunu	Tersedianya Rancangan DED	1	150.000.000
		kp.mel ayu tuatun u	Tersedianya Bangunan	0	-		kp.mela yu tuatunu	Tersedianya Bangunan	0	-
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	air itam	Jumlah Pembinaan	5	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	air itam	Jumlah Pembinaan	5	150.000.000
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	air itam	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang	2	100.000.000	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	air itam	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang	2	100.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				975.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				975.000.000

			Tersedianya Bapokting	18	200.000.000			Tersedianya Bapokting	18	200.000.000
			Terkendalinya harga Bapokting	<11	450.000.000			Terkendalinya harga Bapokting	<11	450.000.000
			Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	100	325.000.000			Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi	100	325.000.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersedian Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting di gudang distributor	100	200.000.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketersedian Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting di gudang distributor	100	200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Pokok	4	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Pokok	4	100.000.000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Penting	4	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi Barang Kebutuhan Penting	4	100.000.000
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Koevisien Variasi	<11	450.000.000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Koevisien Variasi	<11	450.000.000
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	air itam, koba, sungailiat, toboali	Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	100.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai	Jumlah Pemantauan harga dan stok	84	100.000.000

		, sungai baru, tanjung pendam, manggar				Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	baru, tanjung pendam, manggar			
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Operasi Pasar	14	350.000.000	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Operasi Pasar	14	350.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11	325.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi	11	325.000.000

	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Pemeriksaan	11	50.000.000	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Pemeriksaan	11	50.000.000
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Pengawasan	2	75.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Pengawasan	2	75.000.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk ersubsidi	air itam, koba, sungailiat, toboali	Jumlah Pengawasan	11	100.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai	Jumlah Pengawasan	11	100.000.000

		, sungai baru, tanjung pendam, manggar					baru, tanjung pendam, manggar			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi	4	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	air itam, koba, sungailiat, toboali, sungai baru, tanjung pendam, manggar	Jumlah Koordinasi	4	100.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	1.800	1.350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	1800	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang				1.350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1				1.100.000.000

	terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota					(satu) daerah kabupaten/kota				
		Jakarta , Asia, Eropa	Jumlah Akses Pasar Ekspor	6	1.150.000.000		Jakarta, Asia, Eropa	Jumlah Akses Pasar Ekspor	6	900.000.000
		Pangkalpinang , Belitung	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45	200.000.000		Pangkalpinang, Belitung	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih	45	200.000.000
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jakarta , Asia, Eropa	Jumlah Partisipasi Pameran	3	650.000.000	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jakarta, Asia, Eropa	Jumlah Partisipasi Pameran	3	500.000.000
	Pameran Dagang Lokal	Pangkalpinang , Bangka Tengah	Jumlah Pameran	1	200.000.000	Pameran Dagang Lokal	Pangkalpinang, Bangka Tengah	Jumlah Pameran	1	200.000.000
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jakarta , Asia	Jumlah Permintaan Dagang	2	300.000.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jakarta, Asia	Jumlah Permintaan Dagang	2	200.000.000
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pangkalpinang , Belitung	Jumlah Peserta Calon Eksportir	45	200.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pangkalpinang, Belitung	Jumlah Peserta Calon Eksportir	45	200.000.000

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.625.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.375.000.000
			Indeks Keberdayaan Konsumen	40 (Mamp u)	875.000.000			Indeks Keberdayaan Konsumen	40 (Mamp u)	875.000.000
			Persentase Layanan Terstandarisasi	21,43	750.000.000			Persentase Layanan Terstandarisasi	21,43	500.000.000
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000
			Jumlah Konsumen yang teredukasi	93	400.000.000			Jumlah Konsumen yang teredukasi	640	400.000.000
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	40	100.000.000			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk	3	100.000.000
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Toboali	Jumlah Peserta	600	300.000.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Toboali	Jumlah Peserta	600	300.000.000
	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Bukit Betung , Kota,	Jumlah Lembaga Perlindungan	3	100.000.000	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga	Bukit Betung, Kota,	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang aktif	3	100.000.000

		Desa Padang	Konsumen yang aktif			perlindungan konsumen	Desa Padang			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru	Jumlah Pengaduan	40	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Pasar Padi, Taman Bunga, Genas, Sungailiat, Dul, Berok, Tanjung, Toboali, Kota, Desa Baru	Jumlah Pengaduan	40	100.000.000
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90	750.000.000	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90	500.000.000
	Verifikasi Mutu Produk	Kelurahan Air Gegas (Bangka selatan), Kelurahan Kelapa (Bangka a	Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	250.000.000	Verifikasi Mutu Produk	Kelurahan Air Gegas (Bangka selatan), Kelurahan Kelapa (Bangka Barat), Kelurahan	Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	200.000.000

		Barat), Kelurahan Naman- g (Bangka Tengah), Kelurahan Membalong (Belitung) dan Kelurahan Denda- ng (Belitung Timur)					an Namang (Bangka Tengah) , Kelurahan Membalong (Belitung) dan Kelurahan Denda- ng (Belitung Timur)			
	Pengembangan Layanan Pengujian	Kelurahan Payung (Kab.Bangka selatan), Kelurahan Naman- g (Kab. Bangka Tengah), Kelura	Jumlah Produk yang di uji	200	250.000.000	Pengembangan Layanan Pengujian	Kelurahan Payung (Kab.Bangka selatan), Kelurahan Namang (Kab. Bangka Tengah) , Kelurahan	Jumlah Produk yang di uji	200	150.000.000

		han Mento k (Kab. Bangka Barat) ,Kelur ahan Sijuk(K ab. Belitun g) dan Kelura han Gantun g (Kab. Belitun g Timur)					Mentok (Kab. Bangka Barat) ,Kelura han Sijuk(Ka b. Belitung) dan Kelurah an Gantung (Kab. Belitung Timur)			
	Pengembangan Layanansertifikasi	Kelura han Payung (Kab.B angka selatan) , Kelura han Naman g (Kab. Bangka Tengah) , Kelura han Mento k (Kab. Bangka	Jumlah produk		0	Pengembangan Layanansertifikasi	Kelurah an Payung (Kab.Ba angka selatan), Kelurah an Namang (Kab. Bangka Tengah) , Kelurah an Mentok (Kab. Bangka Barat	Jumlah produk	0	-

		Barat ,Kelurahan Sijuk(Kab. Belitung) dan Kelurahan Gantung (Kab. Belitung Timur)					),Kelurahan Sijuk(Kab. Belitung) dan Kelurahan Gantung (Kab. Belitung Timur)			
	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Kelurahan Payung (Kab.Bangka selatan), Kelurahan Namanang (Kab. Bangka Tengah), Kelurahan Mentok (Kab. Bangka Barat),Kelurahan Sijuk(K	Jumlah Alat yang dikalibrasi	25	250.000.000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Kelurahan Payung (Kab.Bangka selatan), Kelurahan Namang (Kab. Bangka Tengah), Kelurahan Mentok (Kab. Bangka Barat),Kelurahan Sijuk(Ka b.	Jumlah Alat yang dikalibrasi	25	150.000.000

		ab. Belitung) dan Kelurahan Gantung (Kab. Belitung Timur)					Belitung) dan Kelurahan Gantung (Kab. Belitung Timur)			
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	16,07	375.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan	16,07	375.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rawa Bangun	Jumlah Peserta	150	100.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rawa Bangun	Jumlah Peserta	150	100.000.000
		Pasir Padi,Pa sir Garam, Srimen anti,Air Ruay, Koba, Simpan g	Jumlah Pengawasan	14	200.000.000		Pasir Padi,Pas ir Garam, Srimena nti,Air Ruay, Koba, Simpang Perlang,	Jumlah Pengawasan	14	200.000.000

		Perlang ,Sungai Daeng, Tanjung g, Sukada mai, Telada n, Tanjung g Pandan , Pangka l Lalang, Padang , Lalang					Sungai Daeng, Tanjung, Sukada mai, Teladan, Tanjung Pandan, Pangkal Lalang, Padang, Lalang			
	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran (kasus)	1	75.000.000	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen		Jumlah fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran (kasus)	1	75.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	40	750.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	40	550.000.000

	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten 2. Kel. Ketabang. Genteng Surabaya, 3.Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta 4. Kec.Batam Kota Prov. Kep. Riau	Jumlah Permintaan Dagang	2	250.000.000	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	1. Kel. Pagedangan Kec.Pagedangan Serpong Tangerang, Prov. Banten 2. Kel. Ketabang. Genteng Surabaya, 3.Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta 4. Kec.Batam Kota Prov. Kep. Riau	Jumlah Permintaan Dagang	2	250.000.000
--	---	--	--------------------------	---	-------------	---	--	--------------------------	---	-------------

	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Kel. Pageda ngan Kec.Pa gedang an Serpon g Tanger ang, Prov. Banten 2. Kel. Ketaba ng. Genten g Suraba ya, 3.Kel. Bendu ngan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta 4. Kec.Bat am Kota Prov. Kep. Riau	Jumlah Fasilitasi	4	250.000.000	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Kel. Pagedan gan Kec.Pag edangan Serpong Tangera ng, Prov. Banten 2. Kel. Ketaban g. Genteng Surabay a, 3.Kel. Bendun gan Hilir Kec. Tanah Abang,J akarta 4. Kec.Bat am Kota Prov. Kep. Riau	Jumlah Fasilitasi	4	250.000.000
--	--	---	-------------------	---	-------------	---	---	-------------------	---	-------------

	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keramat	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	50	500.000.000	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Keramat	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	50	300.000.000
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Keramat	Jumlah Fasilitas Produk	200	500.000.000	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Keramat	Jumlah Fasilitas Produk	200	300.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.875.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.495.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertumbuhan jumlah industri	5,24	3.375.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertumbuhan jumlah industri	5,24	3.025.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2	3.375.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri	2	3.025.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri		Dokumen Perencanaan pengembangan kawasan industri	1	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri		Dokumen Perencanaan pengembangan kawasan industri	1	300.000.000

		- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau	Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	700.000.000		- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau	Jumlah IKM OVOP yang dibina	26	500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	- Uji Nutrisi: Bogor, HKI: Jakarta	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Nutrisi dan HKI	150	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	- Uji Nutrisi: Bogor, HKI: Jakarta	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Nutrisi dan HKI	150	200.000.000
		- Gedung Nasional, Sungailiat, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	400	250.000.000		- Gedung Nasional, Sungailiat, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan,	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	400	200.000.000

		g Pandan, Buku Limau					Buku Limau			
		- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Kemasan Produk Industri	450	200.000.000		- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba, Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Kemasan Produk Industri	450	200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Sungailiat, Koba, Baru	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	3	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	- Sungailiat, Koba, Baru	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna	3	200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Gedung Nasional, Sungailiat,	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	500	975.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan	- Gedung Nasional, Sungailiat, Koba,	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda	500	925.000.000

		Koba, Sungai Daeng, Toboali , Tanjung Pandan , Buku Limau, Jakarta				Peran Serta Masyarakat	Sungai Daeng, Toboali, Tanjung Pandan, Buku Limau, Jakarta			
		- Taman Sari, Sungailiat, Koba.Yogyakarta, Jawa Tengah	Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	170	450.000.000		-Taman Sari, Sungailiat, Koba.Yogyakarta , Jawa Tengah	Jumlah SDM Indutsri yang terlatih	170	400.000.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Air Itam	Jumlah Laporan Evaluasi	1	100.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Air Itam	Jumlah Laporan Evaluasi	1	100.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Verifikasi Teknis	50	380.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Verifikasi Teknis	50	350.000.000

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	33,33	380.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri	33,33	350.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapa	Jumlah IUI, IPUI yang diawasi	55	180.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Muntok), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Manggar), Ketapang	Jumlah IUI, IPUI yang diawasi	55	150.000.000

		ng (Pangk al balam)					(Pangk alam)			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Mabat (Bakam), Gunung Muda (Belinyu), Puding (Puding Besar), Cekong Abang (Mendo Barat), Sungai liat (Sungai liat), Air Mesu (Pangkalan Baru), Arung Dalam (Koba),	Jumlah Industri yang diawasi	50	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Mabat (Bakam), Gunung Muda (Belinyu), Puding (Puding Besar), Cekong Abang (Mendo Barat), Sungai liat (Sungai liat), Air Mesu (Pangkalan Baru), Arung Dalam (Koba), Malik (Simpaning Rimba),	Jumlah Industri yang diawasi	50	200.000.000

		Malik (Simpan ng Rimba) , Terent ang (Simpan ng Teritip) , Tempil ang (Tempil ang), Denda ng (Kelapa), air Belo (Munto k), Kembir i (Memb along), Sungai Samak, Air Batu Buding (Badau), air Kelik (Mang gar), Jangka ng				Terenta ng (Simpan g Teritip), Tempila ng (Tempil ang), Dendan g (Kelapa), air Belo (Munto k), Kembiri (Memba long), Su ngai Samak, Air Batu Buding (Badau), air Kelik (Mangg ar), Jangkan g (Dendan g), Buding, Senyub uk (Kelapa Kampit), Ketapan g			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

		(Denda ng), Buding , Senyub uk (Kelapa Kampit), Ketapa ng (Pangk al balam), Semab ung lama (B ukit Intan)					(Pangk alam), Semabu ng lama (Bu kit Intan)			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS	2	120.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS	2	120.000.000

	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60	120.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap	60	120.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Munto k), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Mang gar), Ketapa ng (Pangk	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Sungai liat (Sungai liat), Batu Beriga (Lubuk Besar), Sadai (Tukak Sadai), Air Putih (Munto k), Pengantungan (Badau), Air Kelik (Mang gar), Ketapan g (Pangkal balam)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS	25	120.000.000

		al balam)										
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan memperhatikan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota melalui Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Usulan Kab/Kota melalui Formulir usulan tahun 2021 yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usulan kegiatan yang diakomodir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang tersaji pada tabel 2.5.1 dibawah ini :

Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Timestamp	USULAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN PD	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	LOKASI PELAKSANAAN	NAMA PENGUSUL	STAKEHOLDER PENGUSUL	AKOMODIR		KETERANGAN	PD VERIFIKATOR
												YA	TIDAK		
1	2/6/2020 11:43:43	Penataan Pasar Kota Pangkalpinang	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Pasar Pangkalpinang	HARI KOESTI AWAN	Bappeda Kota Pangkalpinang			Diusulkan Pasar Pagi Kampung Melayu melalui dana TP 7-8M sebagai pasar SNI, Pasar Ratu Tunggal revitalisasi Blok Daging lewat dana DABA/DAK sebesar 4 M	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	2/6/2020 12:29:09	Pendampingan Pelatihan Batik Tulis dan Cap, Pelatihan Teknis Membantu Media Kayu, Pelatihan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Bangka Tengah	Septi	Bappeda Kabupaten Bangka Tengah			Disetujui	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

		Aneka Souvenir, Pelatihan Desain Kemasan, Magang Bagi Pelaku IKM Kerajinan, Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Barcode													
3	2/6/2020 12:33:39	Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Barcode	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Bangka Tengah	Septi	Bappeda Kabupaten Bangka Tengah			Disetujui	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	2/6/2020 12:38:49	Pembangunan Pujasera di eks SD arah Tanjung	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan		Jalan Tanjung Kalian Mentok	Safrizal, SE	Bappeda Kabupaten Bangka			Diusulkan melalui dana DABA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan

		kalian (DABA) Kab Bangka Barat	PERDAGAN GAN		Provinsi serta pasar lelang komoditas		Pusat Distribusi Provinsi				a Barat				Bangka Belitung
5	2/6/2020 12:47:41	Pembang unan Industri Hilir Lada untuk menyera p produksi lada lokal dan menyera p tenaga kerja lokal Kab. Bangka Barat	PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Bangka Barat	Safrizal, SE	Bapp eda Kabu paten Bangk a Barat			Dibahas lebih lanjut	Dinas Perindustria n dan Perdaganga n Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	2/6/2020 13:12:47	Bantuan Alat Roasting Biji Kopi, Pelatihan Pengolah an Pasca Panen, diikutsert akan promosi	PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		Petaling Banjar Mendo Barat Bangka	UMAR DI	IKM Kopi "Kopli ng Banja r"			Disetujui untuk dibahas lebih lanjut	Dinas Perindustria n dan Perdaganga n

		produk kopi dalam event pameran, Bantuan Green House untuk pengolahan biji kopi, Pelatihan Barista													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi dapat dilihat dengan melihat hasil dari Pengukuran dan Penilaian Kinerja. Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa : indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

3.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

Tabel 3.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2021
(eselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran/ Perubahan
1.	Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri	(Rp)	14.157.209.890	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	99.576.274
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	4.070.619.455
		Persentase Tenaga Kerja Industri	%	1,37	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	24.707.786
2.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor	(US\$)	1.835.337.899	Program Pengembangan Perdagangan	30.500.125
3.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	%	<11	Program Pengembangan Perdagangan	629.679.481
4.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	%	1,15	Program Pengembangan Perdagangan	9.878.392

5.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	%	10	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	2.610.790.000
6.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	%	57	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	51.740.000
7.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai	3	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	163.808.899

3.2.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang NO.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang **Kebijakan Industri Nasional**. adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. Sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional
2. IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar
3. Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam)
4. Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar
5. Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan
6. Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcomes yang terdiri dari:

1. Meningkatkan nilai tambah industri
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
4. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan
5. Menguat dan lengkapnya struktur industri
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri, serta
7. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu *“Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing”*.

3.2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Perdagangan;
Dari Tujuan diatas akan dicapai dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :
 1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri;
 2. Meningkatnya Neraca Perdagangan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan, yaitu : Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A). dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 1. Penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019
 2. Pencapaian Visi Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Terdapat 10 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2021
 2. Terdapat 22 Kegiatan yang masing-masing mendukung program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
 3. Terdapat 81 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
 4. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi dan 7 Kab/Kota

- c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Penyesuaian Sub Kegiatan Pada Administrasi Umum Sesuai Kesepakatan Pembahasan dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih jelas rencana program dan kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Disperindag Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021 (Tahun Rencana)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bidang Urusan								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	Pangkalpinang	80	426.014.000	APBD		82	468.615.400
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Pangkalpinang	11 Dokumen	213.007.000	APBD		11 Dokumen	234.307.700
Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renstra/Renja PD	Pangkalpinang	2 Dokumen	106.618.000	APBD		2 Dokumen	117.279.800

Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	Pangkalpinang	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	11.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan evaluasi PD	Pangkalpinang	4 Dokumen	6.200.000	APBD		4 Dokumen	6.820.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	Pangkalpinang	1 Dokumen	76.389.000	APBD		1 Dokumen	84.027.900
Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	Pangkalpinang	3 Dokumen	13.800.000	APBD		3 Dokumen	15.180.000
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Pangkalpinang	80	14.934.809.848	APBD		80	16.382.074.333
Kegiatan Administrasi Keuangan	Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan	Pangkalpinang	80	12.164.520.417	APBD		80	13.380.972.459
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Pangkalpinang	95	12.164.520.417	APBD		95	13.380.972.459
Kegiatan Administrasi umum	survey kepuasan pelayanan umum (angka)	Pangkalpinang	80	2.089.875.000	APBD		80	2.298.862.500
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pangkalpinang	75	2.500.000	APBD		75	2.750.000
	Jumlah Materai	Pangkalpinang	800	4.800.000	APBD		800	5.280.000
	Jumlah tenaga Pramubakti yang dipekerjakan	Pangkalpinang	17	640.900.000	APBD		17	704.990.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	Pangkalpinang	12	128.000.000	APBD		12	140.800.000

Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	12	15.000.000	APBD		12	16.500.000
	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	Pangkalpinang	8	301.600.000	APBD		8	331.760.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	Pangkalpinang	12	8.500.000	APBD		12	9.350.000
	Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Pangkalpinang	3	113.100.000	APBD		3	124.410.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	Pangkalpinang	18	129.135.000	APBD		18	142.048.500
Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dipekerjakan	Pangkalpinang	9	339.300.000	APBD		9	373.230.000
	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Pangkalpinang	10	16.500.000	APBD		10	18.150.000
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Pangkalpinang	10	38.000.000	APBD		10	41.800.000
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak	Pangkalpinang	50	4.500.000	APBD		50	4.950.000
	Jumlah penggandaan	Pangkalpinang	30000	9.000.000	APBD		30000	9.900.000
	Jumlah penjilidan	Pangkalpinang	20	1.500.000	APBD		20	1.650.000
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Pangkalpinang	10	5.000.000	APBD		10	5.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Pangkalpinang	108	7.000.000	APBD		108	7.700.000

Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	Pangkalpinang	100	10.000.000	APBD		100	11.000.000
	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Pangkalpinang	800	16.000.000	APBD		800	17.600.000
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Pangkalpinang	19	100.000.000	APBD		19	110.000.000
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	Pangkalpinang	48	70.000.000	APBD		48	77.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pangkalpinang	1	10.000.000	APBD		1	11.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	1	30.000.000	APBD		1	33.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Jumlah Kendaraan oprasional yang dipelihara	Pangkalpinang	4	85.140.000	APBD		4	93.654.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	2	2.900.000	APBD		2	3.190.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	1	500.000	APBD		1	550.000
	Jumlah BBM Genset	Pangkalpinang	125	1.000.000	APBD		125	1.100.000
Kegiatan Administrasi umum (BPSMB)		Pangkalpinang		176.336.516	APBD			193.970.168
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pangkalpinang	30	400.000	APBD		30	440.000
	Jumlah Materai	Pangkalpinang	100	600.000	APBD		110	660.000

Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	Pangkalpinang	12	58.800.000	APBD		12	64.680.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	Pangkalpinang	5	20.035.000	APBD		5	22.038.500
Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pangkalpinang	1	2.000.000	APBD		1	2.200.000
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Pangkalpinang	10	8.500.000	APBD		10	9.350.000
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetak	Pangkalpinang	2	2.000.000	APBD		2	2.200.000
	Jumlah penggandaan	Pangkalpinang	30000	3.600.000	APBD		30000	3.960.000
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Pangkalpinang	10	1.500.000	APBD		10	1.650.000
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	Pangkalpinang	20	2.000.000	APBD		20	2.200.000
	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Pangkalpinang	80	4.000.000	APBD		80	4.400.000
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Pangkalpinang	3	15.570.000	APBD		3	17.127.000
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	Pangkalpinang	12	15.041.516	APBD		12	16.545.668
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	Pangkalpinang	3	37.340.000	APBD		3	41.074.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	7	4.950.000	APBD		7	5.445.000

Kegiatan Administrasi umum (RPK)		Pangkalpinang		430.897.612	APBD			473.987.373
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pangkalpinang	200	5.550.000	APBD		200	6.105.000
	Jumlah Materai	Pangkalpinang	200	1.200.000	APBD		220	1.320.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	Pangkalpinang	12	75.600.000	APBD		12	83.160.000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	Pangkalpinang	5	15.750.000	APBD		5	17.325.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Pangkalpinang	10	2.500.000	APBD		10	2.750.000
Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Pangkalpinang	10	15.000.000	APBD		10	16.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	jumlah barang cetak	Pangkalpinang	5	5.000.000	APBD		5	5.500.000
	Jumlah penggandaan	Pangkalpinang	10000	3.000.000	APBD		10000	3.300.000
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Pangkalpinang	10	5.000.000	APBD		10	5.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Pangkalpinang	7	129.300.000	APBD		7	142.230.000
Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Pangkalpinang	24	750.000	APBD		24	825.000
Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	Pangkalpinang	25	2.500.000	APBD		25	2.750.000

	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Pangkalpinang	80	2.000.000	APBD		80	2.200.000
Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Pangkalpinang	10	52.850.000	APBD		10	58.135.000
	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	Pangkalpinang	24	38.088.000	APBD		24	41.896.800
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	1	44.259.612	APBD		1	48.685.573
Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/prasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Pangkalpinang	1	27.400.000	APBD		1	30.140.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pangkalpinang	4	5.150.000	APBD		4	5.665.000
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPSMB)		Pangkalpinang		31.165.303	APBD			34.281.833
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	Pangkalpinang	18	31.165.303	APBD		18	34.281.833
Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (RPK)		Pangkalpinang		42.015.000	APBD			46.216.500
Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	Pangkalpinang	4	42.015.000	APBD		4	46.216.500
PERDAGANGAN								
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Perdagangan Bahan Berbahaya		100%	84.678.000	APBD		100%	93.145.800

Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan B2 yang memiliki Perizinan Perdagangan		3	84.678.000	APBD		3	93.145.800
Sub Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Distributor/ Pengecer		3	44.114.000	APBD		3	48.525.400
Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Produk bahan berbahaya		1	40.564.000	APBD		1	44.620.400
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Barang terdistribusi		60%	247.846.000	APBD		65%	272.630.600
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Komoditas yang dikelola (TON)		200	247.846.000	APBD		250	272.630.600
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pengelolaan yang dibina (lokasi)		3	247.846.000	APBD		3	272.630.600
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan Bapokting		80%	392.199.000	APBD		85%	431.418.900
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting (jenis)		18	127.966.000	APBD		18	140.762.600

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok		8	69.408.000	APBD		8	76.348.800
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Distributor/ Sub Distributor Barang Penting		6	58.558.000	APBD		6	64.413.800
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Koevisien Variasi		<11	264.233.000	APBD		<11	290.656.300
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stok		84	82.983.000	APBD		84	91.281.300
Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar		14	181.250.000	APBD		14	199.375.000
	Persentase Tersalurkannya Pupuk Bersubsidi		70%	151.426.000	APBD		75%	166.568.600

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi		11	151.426.000	APBD		11	166.568.600
Sub Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Pemeriksaan (dokumen)		11	41.809.000	APBD		11	45.989.900
Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan (laporan)		2	37.589.000	APBD		2	41.347.900
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk bersubsidi	Jumlah Distributor/pengecer Pupuk bersubsidi yang diawasi		11	35.589.000	APBD		11	39.147.900
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan (laporan)		2	36.439.000	APBD		2	40.082.900
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)		900	580.338.672	APBD		1000	638.372.539
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Akses Pasar Ekspor		3	416.306.500	APBD		3	457.937.150
Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Produk Siap Ekspor yang dipamerkan		2	67.990.000	APBD		2	74.789.000

Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Permintaan Produk Dagang		6	348.316.500	APBD		6	383.148.150
	Jumlah SDM perdagangan yang terlatih		45	164.032.172	APBD		45	180.435.389
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Eksportir/Calon Eksportir		45	164.032.172	APBD		45	180.435.389
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen		40 (Mampu)	501.038.500	APBD		42 (Mampu)	551.142.350
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang terbentuk		3	96.550.000	APBD		3	106.205.000
Sub Kegiatan Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen yang beroperasi		3	96.550.000	APBD		3	106.205.000
	Jumlah Konsumen yang teredukasi		440	215.353.500	APBD		440	236.888.850
Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Responden		400	120.801.500	APBD		400	132.881.650
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan (Informasi, Pertanyaan dan Pengaduan)		40	94.552.000	APBD		40	104.007.200
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan		0,78	189.135.000	APBD		0,78	208.048.500

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Jenis Barang yang diawasi	10	189.135.000	APBD	10	208.048.500
	Persentase Layanan Terstandarisasi	75%	312.153.033	APBD	100%	343.368.336
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produk dan Peralatan yang tersertifikasi	90	312.153.033	APBD	90	343.368.336
Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi yang di verifikasi	3	124.701.213	APBD	3	137.171.334
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sample yang di uji	200	93.525.910	APBD	200	102.878.501
Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi	5	93.925.910	APBD	5	103.318.501
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri	40%	893.316.000	APBD	60%	982.647.600
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Jumlah Permintaan Dagang	4	141.051.000	APBD	4	155.156.100
Sub Kegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk yang dipromosikan melalui permintaan dagang	8	141.051.000	APBD	8	155.156.100
Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk yang Siap dipasarkan	20	106.795.000	APBD	20	827.491.500

Sub Kegiatan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Fasilitas Produk		20	106.795.000	APBD		20	827.491.500
PERINDUSTRIAN								
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri		2%	1.824.324.500			3%	2.006.756.950
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri		2%	1.824.324.500			2%	2.006.756.950
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM OVOP yang dibina		26	152.120.500			26	167.332.550
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Produk Industri yang bersertifikat Uji Product dan HKI		200	447.832.000			200	492.615.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kelompok Industri yang terfasilitasi Teknologi Tepat Guna		2	188.538.000			2	207.391.800
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi Dekranasda		350	760.702.000			350	836.772.200
	Jumlah SDM Industri yang terlatih		80	275.132.000			80	302.645.200

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi (Rumah Promosi dan Kemasan)								
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Produk		200	645.470.000			200	710.017.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang sesuai Izin Usaha Industri		30%	190.111.000			80%	209.122.100
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yg dipantau		55	190.111.000			55	209.122.100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah komitmen IUI, IPIU yang dipantau		5	89.013.000			5	97.914.300
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Jumlah IUI yang diawasi		50	101.098.000			50	111.207.800

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri di SIINAS		70%	69.564.000			90%	76.520.400
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Industri yang menyampaikan informasi industri secara lengkap		60	69.564.000			60	76.520.400
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Industri Yang Terdaftar di SINAS		25	69.564.000			25	76.520.400

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan OPD.

Dengan adanya Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Fungsi Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah sebagai pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2021.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093 Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093 email : perindag@babelprov.go.id